

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERDAYAKAN UMKM
DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS KAMPUNG BATIK KOTA
SEMARANG)**

Oleh

Giovanni Malemta Purba

**Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos

1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) themselves are an important part of the economy of a country or region, not least in the city of Semarang itself. Semarang City is one of the big cities in Indonesia which is the capital city of the Central Java Province. Semarang itself is often known as an industrial city, trade and services. The city of Semarang itself is the capital of Central Java Province where this big city has a lot of potential based on its geographical and historical location. Semarang has a batik "Semarangan" which signifies the characteristics of the city of Semarang so that it can be said is one of the potential of the city of Semarang.

Semarang city government itself has considered Semarang batik as a superior product of Semarang City because of its motifs and patterns that describe the city of Semarang itself, so that semarangan batik products are only found in the city of Semarang. This has also been included in the OVOP (One Village One Product) program in 2012 which means that Semarang batik has been considered and recognized by the Semarang City government as one of the superior products of Semarang City.

In conducting research, researchers used descriptive qualitative research methods, this descriptive qualitative research aims to describe, record, analyze and interpret conditions that currently occur or exist. In other words, this qualitative descriptive study aims to obtain information about the existing conditions.

The results of this study indicate that the role of government in empowering MSMEs in Semarang City's Bubakan Batik Village here, represented by the Semarang City Office of Cooperatives and MSMEs, has carried out the role of

facilitator, regulator and catalyst, in its implementation according to the indicators. maybe and ready to facilitate, but there are still problems that occur because there is still no synergy between related agencies involved in empowering MSMEs and there is still no good communication between the agencies related to the UMKM actors themselves, plus the roles and responses of actors The UMKM itself is still not good at welcoming the efforts of the Semarang City Government.

Keywords: MSMEs, role theory, empowerment indicators

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang sendiri. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan ibu kota wilayah Provinsi Jawa Tengah. Semarang sendiri sering dikenal dengan kota industri, dagang dan jasa. Kota Semarang sendiri merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah dimana kota besar ini memiliki banyak potensi berdasar letak geografis maupun historisnya. Semarang mempunyai batik nya “Semarangan” yang menandakan ciri khas kota Semarang tersebut sehingga bisa dibilang itu merupakan salah satu potensi kota Semarang.

Pemerintah kota Semarang sendiri sudah menganggap batik Semarang ini sebagai produk unggulan Kota Semarang karena motif dan coraknya yang menggambarkan kota Semarang sendiri, sehingga produk batik semarangan hanya dijumpai di kota Semarang. Ini juga sudah dimasukkan dalam program *OVOP (One Village One Product)* tahun 2012 yang berarti batik Semarang sudah dianggap dan diakui pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu produk unggulan Kota Semarang.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang disini yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, dalam pelaksanaannya sesuai indikator-indikator yang ada bisa dikatakan pemerintah sudah berupaya seoptimal mungkin dan siap memfasilitasi namun masih ditemukan masalah-masalah yang terjadi karena masih belum adanya sinergitas antar dinas-dinas terkait yang terlibat dalam pemberdayaan UMKM dan juga masih belum terjadi komunikasi yang baik antara dinas terkait dengan pelaku UMKM itu sendiri, ditambah peran dan respon dari pelaku UMKM itu sendiri yang masih kurang baik dalam menyambut upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang.

Keywords: UMKM, teori peran, indikator pemberdayaan

I. Pendahuluan

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengganti posisi UU No. 32 Tahun 2004, sudah memperlihatkan bahwa kekuasaan tidak berpusat hanya di Pemerintah Pusat tetapi mulai ada pembagian beberapa kewenangan dari pusat kepada daerah guna menjalankan urusan pemerintah secara mandiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut melalui pelayanan, birokrasi dan pemberdayaan yang baik. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan menggunakan seluruh potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga berdampak juga terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah adalah sektor ekonomi. Pemerintah Daerah perlu memerhatikan sektor ekonomi daerahnya dengan memerhatikan potensi dan keanekaragaman daerah tersebut sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan masyarakat daerah tersebut menjadi sejahtera

Dalam era globalisasi, yang utama adalah mengurangi berbagai hambatan perdagangan, pembangunan yang mengedepankan prakarsa masyarakat secara luas tersebut menjadi semakin penting karena akan meningkatkan daya saing bangsa, ditambah lagi akan adanya program MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang nantinya membuat persaingan antar warga Asia Tenggara akan semakin terbuka. Hal ini menjadi pekerjaan untuk Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah sendiri untuk menyiapkan masyarakatnya mampu bersaing dalam era MEA tersebut. Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam PROPENAS 2005 sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan adalah mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif serta memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi

pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah termasuk yang berskala mikro, serta koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Posisi seperti itu menempatkan sektor tersebut sebagai jalur utama dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Dalam mewujudkan pengembangan usaha nasional, usaha kecil perlu dibina menjadi usaha menengah yang makin efisien dan mampu berkembang secara mandiri, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan diharapkan makin mampu meningkatkan peranan dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai komponen, baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kaitan dengan pembentukan sebuah usaha, tentu mekanisme dalam pembentukan yang benar yaitu dengan prosedur serta bantuan fasilitator dari sebuah kerjasama instansi.

UMKM di Indonesia sendiri telah berperan sebagai pelaku utama kegiatan-kegiatan ekonomi, penyedia kesempatan kerja dan penggerak ekonomi daerah serta masyarakat. UMKM dapat dikatakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya juga dalam hal pendapatan. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari (Kementerian Koperasi dan UMKM, 2005):

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
2. Penyedia lapangan kerja;
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran UMKM selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran penting UMKM menurut Bank Indonesia antara lain:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.
2. Menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan lowongan kerja.

3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Kota Semarang sendiri. Kota Semarang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang merupakan ibu kota wilayah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai potensi besar baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri, ditambah lagi potensi Kota Semarang sendiri yang identik dengan kota industri, perdagangan dan jasa.

Hingga tahun 2012, jumlah unit usaha UMKM mencapai 4 juta unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9,4 juta orang (skala nasional). Dari jumlah UMKM tersebut, investasi yang dihasilkan mencapai Rp 261 triliun dengan nilai ekspor sebesar USD 16,5 milyar atau 14,2% dari total ekspor industri non-migas. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting bagi industri nasional.

Sementara di kota Semarang sendiri pada tahun 2015 sudah terdapat kurang lebih 11.858 UMKM di Kota Semarang, UMKM yang telah terdaftar dan mengantongi izin berdiri, UMKM sendiri dapat menyerap tenaga kerja sedikit banyak mencapai 18.000 orang. Pemerintah Kota Semarang sendiri harus terus memberdayakan eksistensi UMKM melalui pembinaan kegiatan usaha, manajemen, membantu di bidang pemasaran dan juga permodalan agar UMKM ini nantinya tidak hanya berkembang namun juga dapat mandiri, melihat peranannya yang begitu penting dalam perekonomian bagi daerah maupun masyarakat.

Melihat peranan UMKM pada perekonomian yang semakin penting, UMKM seharusnya mendapat perhatian yang semakin besar dari para pengambil kebijakan, khususnya lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas perkembangan UMKM itu sendiri. Adanya suatu campur tangan dari pemerintah terhadap UMKM itu sendiri akan sangat berdampak pada keberlangsungannya, seperti yang diungkapkan George J. Stigler dalam Mandala Harefa (2008: 206), bahwa "Regulasi adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya atau pada sekelompok

masyarakat”. Maka dari itu strategi pemerintah sangat penting peranannya dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang khususnya, melihat daya saing yang begitu ketat di dunia UMKM, sehingga UMKM di Kota Semarang sendiri mampu berkembang dan mandiri guna menciptakan perekonomian daerah yang mandiri serta masyarakat yang sejahtera sesuai dengan asas diberlakukannya desentralisasi yang memberikan otonomi kepada masing-masing Pemerintah Daerah guna membantu kinerja Pemerintah Pusat.

Pemberdayaan UMKM sendiri diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008, maka dari itu Pemerintah Daerah harus memerhatikan UMKM di daerahnya masing-masing sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam menjalankan UU yang sudah diatur dan disepakati. Menurut bab II pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Dalam mengembangkan sebuah daerah tentu kita harus mengetahui bagaimana karatersitik dan potensi daerah tersebut, maka dari itu perlu identifikasi guna mengetahui itu semua sehingga potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Semarang sendiri sering dikenal dengan kota industri, dagang dan jasa. Kota Semarang sendiri merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Tengah dimana kota besar ini memiliki banyak potensi berdasar letak geografis maupun historisnya. Semarang mempunyai tarian tradisional Gambang Semarang dan Seni Batiknya “Semarangan” yang menandakan ciri khas kota Semarang tersebut dan tentunya hanya masyarakat kota Semarang yang dapat memproduksi batik semarangan tersebut dengan baik sehingga bisa dibilang itu merupakan salah satu potensi kota Semarang.

Batik sendiri adalah karya budaya yang mewakili identitas Indonesia di mata dunia. Dalam selembar kain batik terpapar identitas budaya dan sejarah sebuah daerah atau kota. Kain batik yang diidentikkan sebagai kain Nusantara kini berkembang menjadi industri modern. Ditambah lagi setelah ditetapkannya batik sebagai budaya tak wujud warisan manusia asli Indonesia oleh *United Nation Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sejak 2 Oktober 2009 lalu, membuat industri batik mengalami pertumbuhan sebesar 67 persen per tahun.

Industri batik berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini mampu menyumbang devisa negara yang cukup signifikan dari ekspor. Nilai ekspor batik dan produk batik sampai Oktober 2017 mencapai USD51,15 juta atau naik dari capaian semester I tahun 2017 sebesar USD39,4 juta. Tujuan pasar utamanya ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Hingga saat ini, UMKM Industri batik tersebar di 101 sentra seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I Yogyakarta. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sentra IKM batik mencapai 15 ribu orang.¹ Melihat data tersebut tentu ini merupakan potensi unggulan yang harus digali khususnya oleh pemerintah Kota Semarang karena potensi dan karakteristik yang dimiliki Kota Semarang sangat menunjang tetapi pada nyatanya batik motif semarangan di sentra kota Semarang sendiri kurang mendapat perhatian umum dari pada sentra batik di kota-kota lainnya misalnya Yogyakarta, Solo ataupun Pekalongan dan tentunya disisi lain adalah upaya untuk melestarikan kebudayaan ataupun kearifan local itu sendiri.

Batik Semarang adalah varian dari batik pesisiran, yang sebenarnya bukan pemain baru dalam dunia seni batik. Batik Semarang pernah berjaya pada abad 18 sampai abad 19, karena waktu itu batik Semarang telah dipakai oleh semua kalangan, baik dari kelas bawah, menengah maupun atas. Batik Semarang sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Kota Semarang, keberadaannya saat ini belum banyak dikenal oleh masyarakat luas baik dari segi motif batik maupun aktivitas perbatikan. Untuk batik di Jawa misalnya orang/ masyarakat akan menyebut Solo, Yogya, Pekalongan, Lasem, Cirebon, Banyumas dll. Namun demikian bukan berarti Kota Semarang tidak mempunyai warisan budaya batik sama sekali, karena pada kenyataannya dalam beberapa literature muncul beberapa batik yang tegas-tegas disebut Batik Semarang khususnya dalam ulasan mengenai batik pesisir. Begitu pula muncul beberapa nama pengusaha batik, adanya kampung batik disekitar wilayah bubakan. Kenyataan inilah yang dapat dipakai pijakan jejak historis Batik Semarang.

¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober-2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampau-USD-51-Juta>

Terbakarnya Kampung Batik di kawasan Bubakan, Kota Semarang, pada zaman pendudukan Jepang ikut andil terhadap tenggelamnya batik semarang, selain karena kalah bersaing dengan batik printing. Padahal, waktu itu terdapat puluhan industri batik dengan jumlah perajin mencapai ratusan orang. Dalam berita Belanda (Kolonial Verslag, 1919 & 1925), disebutkan bahwa industri batik di Semarang mencapai 107 buah, dengan jumlah perajin sebanyak 800 orang.

Dalam perkembangannya muncul berbagai pengrajin batik Kota Semarang yang secara intensif mengusung motif dengan ciri khas Semarang, diantaranya motif warak ngendok dan Pandan Arang, Semen Dango Awang, Jembatan Mberok, Yaik Permai, Tugumuda, Kekiteran Sukun, Blekok Srongol, Lawang Sewu, Nawang, Merak Semawis, Merak Kinasih, Pohon Asem, Kukilo Asri, Puspitasari, Samudera Amengkunagari, Puspita Lestari, Asem Arang Gede, Asem Arang Daun, Asem Semarangan, Asem Gunung, Aksara Wayang. Motif-motif tersebut memunculkan ikon khas Semarang dan tidak akan dijumpai pada batik manapun.

Kampung Batik Semarang sendiri mungkin masih terdengas asing oleh kebanyakan orang baik di daerah Semarang sendiri maupun dari daerah lain. Memang Kampung Batik Semarang belum begitu tersohor di kalangan masyarakat seperti halnya Kampung Batik Laweyan Solo. Tetapi ternyata, Kampung Batik Semarang ini memiliki sejarah yang panjang dan melalui berbagai masa yang jatuh bangun. Kampung Batik Semarang mengembangkan batik khas semarangan yang bertemakan flora dan fauna serta paduan seni cina. Pengrajin batik di Kampung Batik Semarang mayoritas warga asli Semarang yang mewarisi ketrampilan ini secara turun temurun dan yang telah mengalami proses belajar membuat batik khas semarangan. Lokasi Kampung Batik Semarang berada di dekat Bundaran Bubakan, di dekat Kota Lama Semarang atau Pasar Johar Semarang.

Sejarah panjang dari Kampung Batik Semarang dengan produk hasil batik semarangan mengalami masa pasang surut. Pada masa penjajahan, Kampung Batik Semarang mengalami kejayaan sampai pada tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang, Kampung Batik Semarang mengalami kebakaran hebat yang menghabiskan lokasi. Sejak peristiwa tersebut, Kampung Batik Semarang seolah tenggelam dan tidak ada lagi. Hingga pada tahun 1980 berusaha dibangkitkan

kembali oleh masyarakat sekitar. Tetapi masa kebangkitan tersebut tidak bertahan lama dan tenggelam kembali dengan berbagai masalah yang datang. Sampai pada tahun 2006, Kampung Batik Semarang dibangkitkan dan dikembangkan lagi. Hasilnya dapat bertahan sampai sekarang. Hal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah.

Pengembangan sentra batik Semarang menjadi produk batik masih mengalami kendala. Menurut salah satu pengusaha batik daerah tersebut, hal ini dikarenakan biaya tenaga produksi di Semarang jauh lebih mahal di banding kota lain. Sebagai perbandingan saja, tenaga jahit di kota Pekalongan atau Solo bisa Rp. 2.000 sedangkan di Semarang jauh dari angka itu. Untuk itulah penjahitan produk masal masih di lempar di kota-kota tersebut.

Upaya membangkitkan kejayaan batik Semarang telah dimulai tahun 2006, dipelopori oleh Pemerintah Kota Semarang saat itu. Walaupun tidak ditemukan generasi perajin batik asli dari kampung Batik, namun pelatihan – pelatihan telah banyak diadakan. Tapi gregetnya hingga sekarang belum sehebat gaung batik-batik di kota lainnya. Dan diharapkan industri batik Semarang dapat bersaing dengan batik dikota-kota lain sehingga batik Semarang menjadi produk unggulan yang mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain dan mampu mendukung peningkatan perekonomian dan pariwisata khususnya di Kota Semarang.

Pemerintah kota Semarang sendiri sudah menganggap batik Semarang ini sebagai produk unggulan Kota Semarang karena motif dan coraknya yang menggambarkan kota Semarang sendiri, sehingga produk batik Semarang hanya dijumpai di kota Semarang. Ini juga sudah dimasukkan dalam program OVOP (One Village One Product) thn 2012 yang berarti batik Semarang sudah dianggap dan diakui pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu produk unggulan Kota Semarang.

II. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi - informasi mengenai keadaan yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, menurut Diva Gede, terdapat 3 peran yaitu: fasilitator, regulator dan katalisator. Penelitian ini juga menggunakan indikator - indikator pemberdayaan dari Sunyoto Usman: bantuan dana, pembangunan prasarana, sarana pemasaran, pelatihan social, penguatan kelembagaan.

III. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa baik dari pemerintah maupun pelaku UMKM industri batik di Kampung Batik Bubakan Semarang setuju dan sepemikiran bahwa peran pemerintah seharusnya hadir diberbagai lini sebagai fasilitator, regulator dan katalisator dalam pemberdayaan UMKM industri Batik di Kampung Batik Semarang Bubakan agar dalam pelaksanaan pemberdayaannya dapat dilakukan secara runtut dan terintegrasi.

Peran pemerintah sendiri dalam hal fasilitator sudah ada dalam upayanya memberdayakan UMKM industri batik di kampung batik Bubakan Semarang. Sudah banyak fasilitas yang diberikan oleh dinas terkait dalam hal modal, pemasaran, pelatihan, dll. Contohnya dalam hal pemasaran, dinas terkait sendiri sudah memfasilitasi bisa dilihat dari pendapat yang diberikan tentang pemasaran, namun realitasnya bahwa fasilitas yang sudah diberikan masih belum berjalan optimal dalam fungsinya memfasilitasi pelaku UMKM di bidang pemasaran.

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif sehingga UMKM itu sendiri dapat berkembang. Pemerintah merupakan pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis, dalam hal ini peran pemerintah Kota Semarang khususnya dalam penjelasan dinas terkait merasa sudah melakukan perannya sebagai regulator. Penemuan penelitian di atas menandakan bahwa peran pemerintah sebagai regulator memang sudah dijalankan dan pelaksanaannya juga sudah dijalankan, akan tetapi dalam menjalankan perannya sebagai regulator, masih belum ada sinergitas

terkait pembagian tupoksi tugas dan kewenangannya antara dinas-dinas terkait dalam pemberdayaan UMKM dan ditambah pelaku UMKM sendiri kebanyakan besar tidak atau kurang mengetahui perihal regulasi atau aturan-aturan yang ada.

Pengertian dari katalisator adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru atau mempercepat proses suatu peristiwa. Untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulant untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah dapat melakukan berbagai langkah seperti pemberian penghargaan terhadap UMKM, pemberdayaan komunitas kreatif untuk produktif, prasarana intelektual, dll. Peran pemerintah sebagai katalisator memang sudah berjalan namun dirasa kurang maksimal mengingat Kampung Batik ini masih kurang dilirik oleh khalayak umum berbeda dengan kampung batik di daerah lainnya seperti Solo, Yogyakarta maupun Pekalongan. Kampung Batik Bubakan sendiri bisa dikatakan masih baru dirintis kembali oleh pemerintah Kota Semarang karena potensi yang ada dan kekhasan yang dimilikinya maka dari itu peran pemerintah di sini sebagai katalisator khususnya sangat diperlukan secara intens dan terus menerus sehingga Kampung Batik Bubakan Semarang dapat besar dan berjaya seperti di daerah lain mengingat potensi besar dan kekhasan yang dimiliki.

Dalam pemberdayaannya sendiri menurut Suyoto Usman ada beberapa indikator-indikator pemberdayaan UMKM. Sunyoto Usman mengungkapkan pendapatnya bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta mempunyai 5 (lima) indikator pokok, dari indikator-indikator tersebut bisa disimpulkan bahwa:

- A. Sudah ada dana bantuan modal usaha berupa pinjaman atau kredit usaha kepada pelaku UMKM, namun masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui hal tersebut sehingga belum bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
- B. Belum optimalnya pembangunan prasarana dan pengoptimalan prasarana untuk mendongkrak kegiatan UMKM.

- C. Masih belum adanya pemberian sarana pemasaran secara nyata kepada pelaku UMKM dalam bidang pemasaran, masih hanya seputar pelatihan memasarkan online dan dengan pameran-pameran yang diadakan.
- D. Sudah seringnya dilakukan pelatihan-pelatihan membatik guna mendongkrak hasil produksi dan kualitas produksi para pelaku UMKM tersebut.
- E. Sudah adanya pelatihan kelembagaan guna kemandirian para pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengurus internal usahanya, namun terkadang masih ada pelaku UMKM yang belum menerapkan hasil dari pelatihan yang ada.

Berdasar indikator-indikator di atas, Pemerintah Kota Semarang sendiri melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah melaksanakan upaya-upaya sesuai indikator di atas baik dalam pemberian bantuan modal ataupun pinjaman kredit, pembangunan prasarana-prasarana guna menunjang keberlangsungan UMKM itu sendiri, penyediaan sarana untuk memasarkan hasil produksi para pelaku UMKM, pelatihan-pelatihan guna mendongkrak hasil produksi dan kualitas produksi dan pelatihan kelembagaan guna kemajuan UMKM itu sendiri.

Berdasarkan penemuan penelitian di lapangan, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah sesuai indikator-indikator yang ada kurang optimal karena masih ada para pelaku UMKM yang belum mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah dan juga masih adanya pelaku UMKM yang merasa fasilitas yang sudah diberikan kurang optimal. Peran dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah kurang efisien dan efektif dalam memberdayakan UMKM khususnya di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang ditambah lagi respon yang kurang aktif dari para pelaku UMKM itu sendiri menjadi tambahan kendala dalam keberhasilan pemberdayaan ini.

IV. Penutup

SIMPULAN

Peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Batik Bubakan Kota Semarang disini yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang adalah menjalankan peran sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

Dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator, dalam pelaksanaannya memberikan fasilitas-fasilitas guna memberdayakan UMKM masih ditemukan kendala seperti tidak tahunya para pelaku UMKM terkait fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, ada pula program, kebijakan ataupun fasilitas yang kurang efektif dan efisien baik dalam pelaksanaannya maupun hasil atau dampak yang ditimbulkan belum optimal karena kurang tepat sasaran.

Peran regulator sendiri, disini pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, menjalankan perannya dengan sebagai regulator guna mendongkrak keberadaan UMKM itu sendiri berpedoman pada Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Ada juga perda terkait program IJUS MELON yang dilaksanakan pemerintah daerah, namun masih ada tumpang tindih atau ketidak jelasan dari dinas dan instansi-instansi lainnya terkait peran kerja atau kewenangan yang dimiliki sehingga belum ada pembagian tugas kerja yang jelas, hal ini menimbulkan belum adanya kerjasama yang baik dalam memberdayakan UMKM khususnya di Kampung Batik Bubakan Semarang, ditambah lagi para pelaku UMKM khususnya Kampung Batik Bubakan Kota Semarang yang masih belum mengetahui regulasi atau aturan yang ada menyebabkan peran pemerintah masih belum bisa dikatakan optimal.

Dalam hal peran nya sebagai katalisator, untuk memacu pihak UMKM meningkatkan jumlah produksi ataupun kualitas produksi dengan mengadakan perlombaan-perlombaan yang nantinya juara dari perlombaan a tersebut akan mendapat penghargaan, dan juga memberikan sertifikat terhadap para pelaku UMKM yang telah mengikuti pelatihan ataupun bimbingan yang diadakan oleh pemerintah Kota Semarang. Namun berdasar hasil penemuan penelitian, peran pemerintah dalam hal katalisator masih kurang optimal karena dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sendiri juga masih belum mempunyai gambaran yang jelas terkait peran pemerintah dalam hal katalisator, masih hanya sebatas mengadakan perlombaan dan pemberian penghargaan maupun sertifikat.

Peran Pemerintah Kota Semarang sebagai fasilitator, regulator maupun katalisator memang sudah dilakukan, akan tetapi peran yang sudah dilakukan kurang optimal karena masih adanya para pelaku UMKM terkait ketidaktahuan

akan peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan juga masalah-masalah lainnya yang sudah dijelaskan di atas, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri sebagai pihak berwenang serta ditambah kurangnya minat dari pelaku UMKM untuk mencari tahu akan peran ataupun program yang sudah dilaksanakan pemerintah dan kurangnya minat menerapkan pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan, sehingga peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM Kampung Batik Bubakan Semarang masih dirasa belum efektif dan efisien.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Pemerintah Kota Semarang terkait upayanya dalam memberdayakan UMKM di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang), maka penulis mempunyai rekomendasi saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Semarang disini sebagai pemegang kewenangan dari pemerintah pusat harus berperan lebih optimal lagi dalam upayanya memberdayakan UMKM khususnya di Kampung Batik Bubakan Semarang mengingat potensi yang ada dan juga kampung batik ini juga baru digaungkan kembali. Peran pemerintah disini diharapkan lebih intens terjun ke masyarakat atau sering mengadakan dialog, audiensi, dll sehingga nantinya program ataupun regulasi yang keluar dapat tepat sasaran, efektif dan efisien juga.

Hal yang harus diperhatikan lagi oleh pemerintah terkait hal pemasaran, mengingat Kampung Batik Bubakan Semarang ini masih belum dikenal khalayak umum. Pemerintah harus lebih inovatif lagi memanfaatkan perkembangan teknologi dalam upayanya membantu pemasaran produk hasil dari pelaku UMKM Kampung Batik Bubakan Semarang karena rata-rata para pelaku mengeluhkan kurang optimalnya pemerintah dalam membantu memasarkan hasil produksi mereka.

Pemerintah juga perlu melakukan sebuah evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan, dari situ akan menghasilkan data yang nantinya dapat menjadi tolak ukur atas target yang sudah ditetapkan di awal dan juga bisa digunakan

sebagai tumpuan untuk regulasi maupun program-program yang dibutuhkan ke depan, mengingat pemberdayaan Kampung Batik Bubakan Semarang ini perlu intens dilakukan karena masih belum sukses kampung batik di daerah lainnya seperti Jogja, Solo maupun Pekalongan.

Bagi Pelaku UMKM

Para Pelaku UMKM disini sebagai sasaran dari upaya maupun peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM itu sendiri juga punya peran penting dalam keberhasilan pemberdayaan tersebut. Keberhasilan dari pemberdayaan ini juga tergantung terhadap respon dan antusias para pelaku UMKM menyambut upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan peran dan kewenangannya.

Pelaku UMKM harus lebih responsif dan antusias guna membantu pemerintah menghasilkan regulasi atau program yang efektif dan efisien. Keaktifan masyarakat ini nantinya bisa digunakan oleh pemerintah dalam membuat sebuah regulasi atau program yang efektif dan efisien. Dari respon yang baik dan aktif nanti juga akan menimbulkan sinergitas antara para pelaku UMKM dengan pemerintah.

Respon yang aktif dan baik disini dapat diwujudkan melalui forum atau dialog yang dibuat oleh para pelaku UMKM guna membahas kebutuhan apa saja yang dibutuhkan serta masalah apa saja yang dihadapi. Hasil tersebut nantinya dapat diaudiansikan oleh perwakilan dari para pelaku UMKM terhadap pemerintah sehingga terjadi komunikasi yang baik antara pelaku UMKM dengan pemerintah dan nantinya regulasi dan aturan yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan para pelaku UMKM.

Selain menjalin dialog ataupun komunikasi dengan pemerintah dalam upayanya membentuk sebuah sinergitas, para pelaku UMKM juga perlu mengimplementasikan hal-hal atau ilmu yang sudah diberikan oleh pemerintah demi keberlangsungan dan kemajuan UMKNya sendiri dan juga dapat memanfaatkan secara optimal baik itu program maupun fasilitas yang sudah disediakan pemerintah, karena pemberdayaan ini tidak akan berhasil jika pihak pelaku UMKM itu sendiri tidak melaksanakan dan menanggapi peran dan kinerja pemerintah dengan respon yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos, M. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John. 2009. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diva, Gede.2009, Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta. Jakarta: Bakric School of Management.
- Soejito, Irawan. 2008, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus. 2000. Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting. Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Web Resources:

<https://radarsemarang.com/2018/07/14/banyak-pedagang-henggang/>

<https://sipd.kemendagri.go.id>

www.diskopumkm.semarangkota.go.id

<http://www.kemenperin.go.id/artikel/18591/Hingga-Oktober-2017,-Nilai-Ekspor-Batik-Lampau-USD-51-Juta>

www.kemenperin.go.id

[www. Semarangkota.bps.go.id](http://www.Semarangkota.bps.go.id)

Undang-Undang:

UU No23. Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU No 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan UMKM